

Katalog BPS : 4102004.1171

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

2018

<https://bandaacehkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH 2018

Katalog BPS : 4102004.1171

Nomor Publikasi : 11715.1801

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 36 halaman

Diterbitkan Oleh : © BPS Kota Banda Aceh

Dicetak Oleh :
CV VARIOUS PRINTING (Cetakan I : April 2019)

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik***

KATA PENGANTAR

Kesejahteraan pada dasarnya mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Menyadari keterbatasan tersebut, publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2018 merupakan publikasi yang menyajikan data tentang kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh pada tahun 2018. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang dilakukan di Kota Banda Aceh pada tahun 2018.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna data.

Banda Aceh, 22 April 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Banda Aceh

Rusmadi, SE

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II	
METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data	3
2.2. Metode Pengumpulan Data	3
2.3. Metode Analisis	3
2.4. Konsep dan Definisi	4
BAB III	
KEPENDUDUKAN	9
3.1. Gambaran Kota Banda Aceh Secara Umum	9
3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	9
3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	11
3.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan	12
3.5. Status Perkawinan dan Usia Perkawinan Pertama	15
BAB IV	
KESEHATAN	16
4.1. Angka Kesakitan	16
4.2. Penolong Kelahiran	17
BAB V	
PENDIDIKAN	19
5.1. Status Pendidikan	19
5.2. Angka Buta Huruf	20
5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	21
5.4. Angka Partisipasi Murni (APM)	21
BAB VI	
KELUARGA BERENCANA	22
BAB VII	
PERUMAHAN	24
7.1. Status Kepemilikan Rumah	24
7.2. Penguasaan Teknologi Informasi	25
7.3. Sumber Penerangan	26
7.4. Sumber Air Minum	26
7.5. Tempat Buang Air Besar	27
BAB VIII	
KONSUMSI DAN PENGELUARAN	29

BAB IX	KEMISKINAN	31
	9.1. Garis Kemiskinan	31
	9.2. Persentase Kemiskinan	32
BAB X	SOSIAL EKONOMI LAINNYA	34

<https://bandaacehkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Gampong Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2018	9
Tabel 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kota Banda Aceh, 2018	10
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2016-2018	12
Tabel 3.4. Persentase Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018	14
Tabel 3.5. Persentase Penduduk 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan di Kota Banda Aceh, 2018	15
Tabel 4.1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Pernah Melahirkan Menurut Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan di Kota Banda Aceh, 2018	18
Tabel 5.1. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kota Banda Aceh, 2018	20
Tabel 5.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca/Tulis dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh, 2018	20
Tabel 5.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh, 2018	21
Tabel 5.5. Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur di Kota Banda Aceh, 2018	21
Tabel 7.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kota Banda Aceh, 2018	25

DAFTAR GRAFIK

		<i>Halaman</i>
Grafik	3.1. Piramida Penduduk Kota Banda Aceh, 2018	13
Grafik	6.1. Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat KB di Kota Banda Aceh, 2018	23
Grafik	7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Banda Aceh, 2018	25
Grafik	7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Masak, Mandi, dan Cuci di Kota Banda Aceh, 2018	27
Grafik	7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh, 2018	28
Grafik	7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh, 2018	28
Grafik	7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Banda Aceh, 2018	28
Grafik	8.1. Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kota Banda Aceh, 2018	29
Grafik	8.2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kota Banda Aceh (Rupiah), 2018	30
Grafik	9.1. Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh (Rupiah), 2013 – 2018	32
Grafik	9.2. Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh, 2013-2018	33
Grafik	10.1. Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kota Banda Aceh, 2018	34
Grafik	10.2. Persentase Penduduk Menurut Jaminan Sosial Dimiliki di Kota Banda Aceh, 2018	35
Grafik	10.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Aset Dimiliki di Kota Banda Aceh, 2018	36



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari berbagai indikator, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan serta pendapatan masyarakat dan ketenagakerjaan.

Data sosial ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat sangat diperlukan untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan tersebut adalah Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra). Publikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2018 menggambarkan data dan informasi mengenai kesejahteraan penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2018 yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun ulasan-ulasan singkat.

1.2. Tujuan

Secara umum pengumpulan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bertujuan untuk mendapatkan indikator-indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat atau tingkat sosial ekonomi masyarakat serta keadaan ketenagakerjaan.

Sasaran pengumpulan data pokok pada Susenas adalah tersedianya data tentang kesejahteraan rakyat, dimana sejak tahun 1992 data pokok tersebut telah

dapat disajikan tidak hanya sampai tingkat provinsi tapi juga sampai tingkat kabupaten/kota. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan atau para peneliti di bidang sosial/kesejahteraan rakyat.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Susenas dan Sakernas 2018 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan sampel rumah tangga. Sampel rumah tangga Susenas dan Sakernas di Kota Banda Aceh tersebar di sembilan kecamatan. Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus (seperti asrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan) dan rumah tangga khusus yang tinggal dalam blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dalam kegiatan Susenas, seluruh rumah tangga sampel dicacah dengan menggunakan Daftar VSEN18.K yang berisi tentang keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga serta VSEN18.KP yang berisi tentang pengeluaran rumah tangga baik makanan maupun non makanan. Sementara itu, rumah tangga sampel dalam kegiatan Sakernas dicacah dengan menggunakan Daftar VSAK18.RT untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Data yang dihasilkan dari sampel Susenas dan Sakernas cukup representatif untuk disajikan hingga tingkat kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2018, disajikan dalam 10 bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan,
2. Bab II Metodologi,
3. Bab III Kependudukan,
4. Bab IV Kesehatan,
5. Bab V Pendidikan,
6. Bab VI Fertilitas dan Keluarga Berencana,
7. Bab VII Perumahan,
8. Bab VIII Konsumsi dan Pengeluaran,
9. Bab IX Kemiskinan,
10. Bab X Sosial Ekonomi Lainnya.



BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data utama Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2018 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Banda Aceh tahun 2014 sampai 2018.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas dan Sakernas 2018 yang ditujukan pada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

2.3. Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh ini meliputi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, konsumsi, dan sosial ekonomi lainnya yang bersifat umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 yang bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel maupun grafik yang tersedia.

2.4. Konsep dan Definisi

a. Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase.

Kepadatan Penduduk yaitu rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di rumah tangga tersebut.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan akan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal disuatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai adalah berpisah sebagai suami/isteri karena bercerai ataupun ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja,

mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

b. Kesehatan

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan.

c. Pendidikan

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di sekolah formal.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu pada usia sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Melek Huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

d. Fertilitas dan KB

Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan pasangan suami istri untuk mencegah atau menunda kehamilan yang terdiri dari alat/cara KB modern dan tradisional.

Alat/cara KB modern meliputi Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi, Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD (*Intra Uterus Device*)/Spiral, Suntikan KB, Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit, Pil KB, Kondom/karet KB, dan Tissue Intravag/kondom wanita.

Alat/cara KB tradisional antara lain pantang berkala/sistem kalender, senggama putus, dan cara tradisional lainnya (tidakampur/puasa, jamu dan urut).

e. **Perumahan**

Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik dengan kemampuan dasar menyerupai telepon tetap kabel namun dapat dibawa kemana-mana (*portable/mobile*).

Komputer mengacu kepada Personal Computer/PC, laptop, atau tablet.

Internet adalah jaringan komputer publik di seluruh dunia.

Sumber air minum adalah sumber dari air yang digunakan untuk keperluan minum anggota rumah tangga.

Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum)

Air sumur terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur.

Kloset leher angsa adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Lainnya adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk tidak mempunyai jamban/kakus.

f. **Sosial lainnya**

Pengeluaran adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang berupa makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

g. **Ketenagakerjaan**

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok bekerja dan kelompok pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam berturut-turut/tidak putus selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discourage worker*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angkatan kerja wanita, usia muda dan usia tua sering menjadi fokus dalam analisis pasar kerja di suatu negara

atau wilayah, disamping mereka yang digolongkan sebagai angkatan kerja prima/utama (*prime age*), yaitu usia 25–54 tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. Tingkat kesempatan kerja diukur sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

<https://bandaacehkota.bp.go.id>



BAB III KEPENDUDUKAN

3.1. Gambaran Kota Banda Aceh Secara Umum

Kota Banda Aceh secara geografis terletak diantara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $61,36 \text{ Km}^2$ (61.359 Ha). Tinggi rata-rata wilayah Kota Banda Aceh sekitar 0,80 m di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Banda Aceh sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara Administrasi, Kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan dan 90 gampong (desa).

Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.

3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk menggambarkan kuatnya tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang pada akhirnya akan membebani tingkat

Tabel 3.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Gampong Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Gampong
(1)	(2)	(3)
Meuraxa	7,26	16
Jaya Baru	3,78	9
Banda Raya	4,79	10
Baiturrahman	4,54	10
Lueng Bata	5,34	9
Kuta Alam	10,05	11
Kuta Raja	5,21	6
Syiah Kuala	14,24	10
Ulee Kareng	6,15	9
Banda Aceh	61,36	90

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018

perekonomian rumah tangga tersebut. Jumlah/komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Ketersediaan data kependudukan yang berkualitas menentukan arah perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Dari segi perencanaan, data ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program pembangunan guna memenuhi fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan masyarakat, tempat ibadah, tempat rekreasi dan lainnya. Sedangkan dari segi evaluasi, data ini dapat menjadi gambaran sampai sejauh mana program yang menyangkut hal kependudukan sudah berjalan, seperti: Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk menekan/mengurangi jumlah kelahiran, Program Wajib Belajar maupun program lain yang berkaitan dengannya. Pada bagian ini, data kependudukan yang disajikan adalah data tentang jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018.

Tabel 3.2.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kota Banda Aceh, 2018

Indikator	2018
(1)	(2)
Luas Wilayah (Km ²)	61,36
Jumlah Penduduk (jiwa)	265 111
- Laki-laki	136 372
- Perempuan	128 739
Rasio Jenis Kelamin	105,93
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	2,00

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018

Hasil proyeksi penduduk tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 265.111 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan. Penduduk laki-laki berjumlah 136.372 jiwa dan perempuan 128.739 jiwa, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 105,93. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 106 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2017-2018 sebesar 2,00 persen (Tabel 3.2.).

3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antar kecamatan terlihat masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terkonsentrasi di pusat perekonomian yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Masalah yang sering timbul akibat kepadatan penduduk pada umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat.

Persebaran penduduk di Kota Banda Aceh terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam, Syiah Kuala dan Baiturrahman dengan persentase masing-masing sebesar 19,86 persen, 14,31 persen, dan 14,13 persen. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu kecamatan Kuta Raja dengan jumlah penduduk sebanyak 13.632 jiwa.

Kecamatan Baiturrahman yang luasnya hanya 4,54 km² (13,59 persen dari total luas Kota Banda Aceh), merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 8.250 jiwa per km² tahun 2018 sedangkan Kecamatan Kuta Raja merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan penduduk 2.617 jiwa per km² pada tahun 2018.

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Banda Aceh, 2016-2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meuraxa	19 388	19 770	20 166	2 671	2 723	2 778
Jaya Baru	25 012	25 503	26 013	6 617	6 747	6 882
Banda Raya	23 459	23 919	24 398	4 897	4 994	5 094
Baiturrahman	36 013	36 721	37 455	7 932	8 088	8 250
Lueng Bata	25 114	25 607	26 119	4 703	4 795	4 891
Kuta Alam	50 618	51 614	52 645	5 037	5 136	5 238
Kuta Raja	13 107	13 365	13 632	2 516	2 565	2 617
Syiah Kuala	36 477	37 193	37 938	2 562	2 612	2 664
Ulee Kareng	25 716	26 221	26 745	4 181	4 264	4 349
Banda Aceh	254 904	259 913	265 111	4 154	4 236	4 321

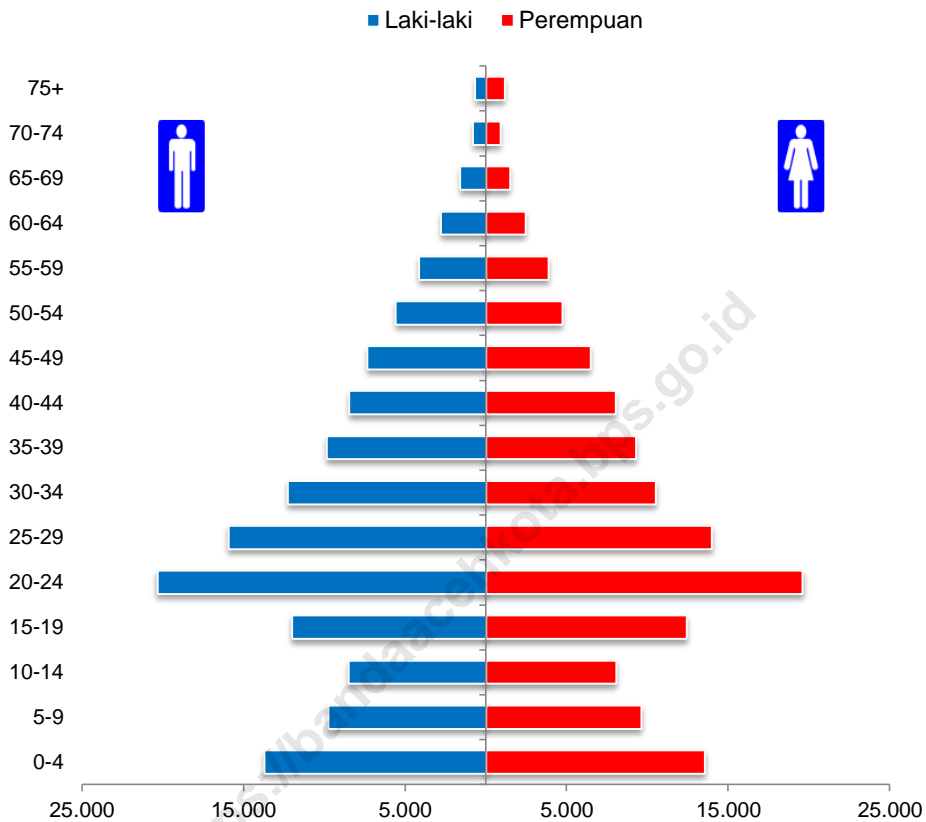
Sumber: BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)

3.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan

Dari struktur umur penduduk di suatu daerah, dapat diketahui apakah penduduk di wilayah tersebut berstruktur umur muda atau berstruktur umur tua. Dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), dan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun keatas lebih kurang 3 persen. Sebaliknya dikatakan berstruktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang.

Grafik 3.1.
Piramida Penduduk Kota Banda Aceh, 2018



Sumber: BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)

Grafik piramida penduduk Kota Banda Aceh 2018 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada pada kelompok umur dibawah 10 tahun cenderung bertambah karena peningkatan jumlah penduduk selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Kota Banda Aceh masih cukup tinggi. Dengan demikian, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menekan angka kelahiran, misalnya dengan menggalakkan program KB dan menunda usia perkawinan pertama.

Berdasarkan Tabel 3.4., Penduduk Kota Banda Aceh sebagian besar berada pada kelompok umur produktif atau masih tergolong struktur umur muda, yaitu 73,18 persen. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 24,19 persen pada tahun 2018 serta penduduk umur 65 tahun keatas sebesar 2,63 persen. Salah satu penyebab Kota Banda Aceh memiliki proporsi penduduk

produktif yang cukup tinggi karena merupakan ibukota provinsi dengan sarana dan prasarana yang tentu lebih baik dari wilayah lain, sehingga mendorong terjadinya perpindahan penduduk usia produktif dari wilayah lain ke Banda Aceh. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi dan tantangan ke depan pada era perdagangan bebas dan globalisasi.

Untuk mengetahui sejauh mana besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif, dapat dilihat dari angka rasio beban ketergantungan baik anak-anak (0–14 tahun) maupun lansia (≥ 65 tahun). Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 Angka Beban Ketergantungan Kota Banda Aceh 36,64 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 37 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 3.4.
Persentase Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan
Kota Banda Aceh, 2016-2018

Kelompok Umur	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14 tahun	24,44	24,31	24,19
15-64 tahun	73,06	73,13	73,18
≥ 65 tahun	2,50	2,56	2,63
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Angka Beban Ketergantungan	36,87	36,75	36,64

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016-2018)

Pada tahun 2017 angka beban ketergantungan mengalami penurunan menjadi 36,75 persen yang artinya pada tahun 2017 setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 37 penduduk usia tidak produktif, dan selanjutnya pada tahun 2018 angka beban ketergantungan kembali mengalami penurunan menjadi 36,64 persen. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif meningkatkan kualitas dirinya.

3.5 Status Perkawinan dan Usia Perkawinan Pertama

Perkawinan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Umur perkawinan pertama bagi wanita mempunyai dampak demografis karena berpengaruh terhadap angka fertilitas. Semakin muda seorang wanita kawin, semakin panjang masa reproduksinya dan semakin besar kemungkinan untuk mempunyai anak. Untuk itulah penduduk dimotivasi untuk menunda usia perkawinan pertamanya hingga mencapai usia diatas 20 tahun untuk perempuan dan diatas 25 tahun bagi laki-laki. Penundaan usia perkawinan dapat juga berdampak pada penurunan kematian ibu saat melahirkan maupun kematian bayi dan anak, karena usia perkawinan pertama pada usia muda, misalnya dibawah 17 tahun dapat berpengaruh terhadap stabilitas keluarga serta kesehatan wanita itu sendiri maupun anaknya. Semakin dewasa seseorang melangsungkan perkawinan pertamanya, maka semakin sehat waktu melahirkan dan makin sempurna dalam perawatan anak.

Pada dasarnya ada dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perubahan status dari status belum kawin ke status kawin.
2. Kawin kembali yaitu perubahan dari status cerai menjadi kawin.

Penduduk berumur 15-49 tahun ke atas yang belum kawin di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 mencapai 48,41 persen, persentase penduduk berstatus kawin sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk yang berstatus belum kawin yaitu sebesar 49,19 persen. Penduduk Kota Banda Aceh yang cerai sebanyak 2,40 persen. Persentase laki-laki yang

Tabel 3.5.
Persentase Penduduk 15-49 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Banda Aceh, 2018

Status Perkawinan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	
Belum Kawin	53,94	42,49	48,41
Kawin	45,09	53,58	49,19
Cerai	0,97	3,93	2,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2018)

belum kawin lebih besar dibanding perempuan, yaitu masing-masing sebesar 53,94 persen dan 42,49 persen (Tabel 3.5.). Sementara itu, penduduk perempuan yang berstatus cerai sebesar 3,93 persen lebih besar daripada laki-laki (0,97 persen).



BAB IV KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk antara lain dapat diukur dengan angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi derajat kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia, terlebih bila dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak.

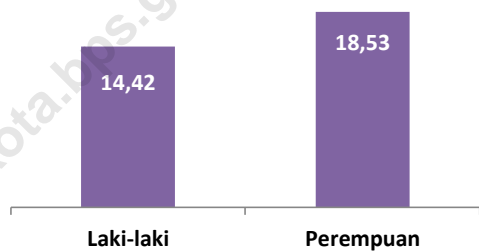
4.1. Angka Kesakitan

Informasi status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan

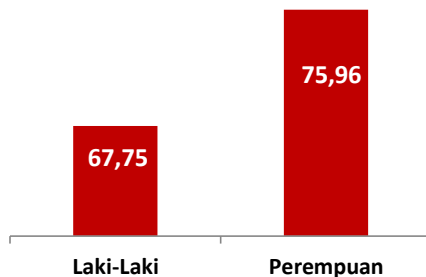
kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, menunjukkan bahwa derajat kesehatan di suatu daerah masih rendah, demikian juga sebaliknya, apabila angka kesakitan penduduk rendah menunjukkan derajat kesehatan di daerah tersebut sudah semakin baik. Angka kesakitan ini dapat dicerminkan oleh banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan berdasarkan jenis keluhan yang dideritanya.

Berdasarkan Grafik 4.1., pada tahun 2018 persentase penduduk laki-laki di Kota Banda Aceh yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari lebih sedikit dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 14,42 persen dan 18,53 persen.

Grafik 4.1.
Angka Kesakitan di Kota Banda Aceh, 2018



Grafik 4.2.
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Grafik 4.2. menunjukkan upaya penduduk untuk mengatasi keluhan kesehatan dimana 67,75 persen penduduk laki-laki memilih menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Persentase ini lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan pengguna jaminan kesehatan untuk berobat jalan yang mencapai 75,96 persen.

4.2. Penolong Kelahiran

Penolong kelahiran sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses melahirkan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dapat dianggap lebih baik dibandingkan tenaga non medis

seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan yang kurang baik oleh penolong kelahiran dapat mengakibatkan kondisi kesehatan bayi dan ibu menjadi berbahaya seperti terjadinya kejang-kejang, pendarahan pada ibu saat melahirkan maupun kematian ibu dan anak yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun.

Tabel 4.1.
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Pernah Melahirkan Menurut Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan di Kota Banda Aceh, 2018

Penolong Persalinan	Tenaga Medis	Non Tenaga Medis	Total
(1)	(2)	(3)	
Fasilitas Kesehatan	100,00	0,00	100,00
Non fasilitas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	0,00	100,00

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Pada Tahun 2018, penolong kelahiran bayi di Kota Banda Aceh seluruhnya, 100 persen, dilakukan oleh tenaga medis pada fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh sudut kota Banda (Tabel 4.1.). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penanganan kelahiran di Kota Banda Aceh sudah mengalami kemajuan.



BAB V PENDIDIKAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pada tahap tertentu tingkat pendidikan dapat meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf.

Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana Wajib Belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 menjadi Wajib Belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Diharapkan dengan demikian tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7–18 tahun).

5.1. Status Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Dari Tabel 5.1. terlihat bahwa penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 2,91 persen pada tahun 2018 dimana persentase laki-laki lebih sedikit dari perempuan, yaitu masing-masing 2,13 persen dan 3,74 persen. Sementara

itu, penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah sebesar 36,04 persen, dimana persentase laki-laki sebesar 35,92 persen dan perempuan sebesar 36,17 persen.

Tabel 5.1.
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Ke Atas
Menurut Status Pendidikan di Kota Banda Aceh, 2018

Status Pendidikan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	2,13	3,74	2,91
Masih sekolah	35,92	36,17	36,04
Tidak bersekolah lagi	61,96	60,09	61,05
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

5.2. Angka Buta Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 10 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Berdasarkan Tabel 5.2., persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca/menulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sebesar 99,66 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk buta huruf yang masih tersisa dialami oleh penduduk perempuan yakni 0,70 persen sementara penduduk laki-laki telah bebas buta huruf.

Tabel 5.2.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Baca/Tulis dan Jenis Kelamin di
Kota Banda Aceh, 2018

Tahun	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Melek Huruf	100,00	99,30	99,66
Buta Huruf	0,00	0,70	0,34

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani.

APS merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Sebagai standar, program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai dari APS umur 7-12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13–15 tahun lebih dari 70 persen.

Tabel 5.3.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh, 2018

Tahun	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	100,00	100,00	100,00
13-15	100,00	100,00	100,00
16-18	88,79	96,97	92,74

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SIUSFNAS 2018)

5.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Hal ini menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 5.4.

Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur di Kota Banda Aceh, 2018

APM	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	100,00	100,00	100,00
SMP	80,17	88,74	84,42
SMA	73,45	92,08	82,45

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS

Berdasarkan Tabel 5.5., APM pada jenjang SD pada tahun 2018 sebesar 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh murid SD berumur 7-12 tahun. Pada jenjang pendidikan SMP, APM sebesar 84,42 persen yang berarti bahwa hanya 84,42 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku

SMP/ sederajat dan selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di bangku SMA. Demikian juga dengan APM SMA sebanyak 84,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 84,45 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA sedangkan sisanya masih duduk di bangku SMP atau sudah ke perguruan tinggi.



BAB VI

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

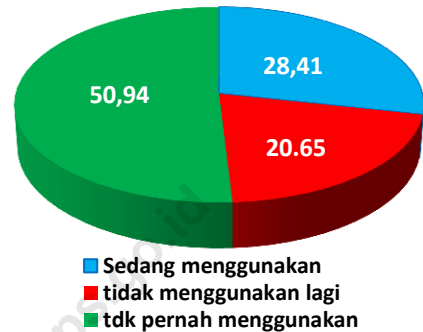
Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu dari ketiga komponen yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk disamping mortalitas dan migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, dan proporsi yang kawin, sedangkan faktor non demografi antara lain, keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi.

Kemampuan seorang wanita melahirkan anak, tergantung dari beberapa faktor antara lain seperti umur perkawinan pertama serta kesuburan wanita tersebut. Usia subur bagi wanita adalah 15–49 tahun, karena pada selang usia ini kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar, dengan demikian Program Keluarga Berencana umumnya ditujukan bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Wanita berumur 15–49 tahun digolongkan sebagai Wanita Usia Subur (WUS), dimana dalam kelompok usia ini, menurut ilmu kesehatan merupakan usia yang paling produktif dalam hal melahirkan anak. Untuk itu Program KB memusatkan sasarannya terhadap wanita yang berada dalam kelompok usia ini, penurunan angka kelahiran (*fertilitas*) merupakan salah satu sasaran Program KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Penurunan angka kelahiran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat, bertambahnya peran wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai wanita karier, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia pada umumnya faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas adalah Program KB.

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan wanita usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi KB di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Grafik 6.1. Pada tahun 2018, wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan KB sebanyak 28,41 persen sedangkan yang tidak menggunakan lagi sebanyak 20,65 persen dan yang tidak pernah menggunakan KB sebanyak 50,94 persen.

Grafik 6.1.
Persentase Wanita Berusia 15-49 Tahun Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat KB di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)



BAB VII PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Tanpa tempat tinggal dan tempat berlindung tentunya manusia tidak dapat hidup layak. Rumah juga dapat menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini tercermin dari jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan oleh rumah tangga. Selain itu fasilitas air minum, penerangan dan tempat buang air besar turut mencerminkan kesejahteraan masyarakat sebagai kebutuhan dasar manusia.

Tingginya permintaan perumahan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk serta kebutuhan manusia akan kenyamanan dan perlindungan. Hingga saat ini tidak semua rumah tangga memiliki rumah sendiri. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia melalui BTN dan PERUMNAS telah berusaha menyediakan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan cara pembayaran angsuran, walaupun disadari perumahan yang ditawarkan tersebut belum semuanya memenuhi persyaratan kenyamanan bagi yang menghuninya karena keterbatasan dana dan kemampuan pemerintah serta masyarakat itu sendiri. Rumah yang baik bukan saja memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya.

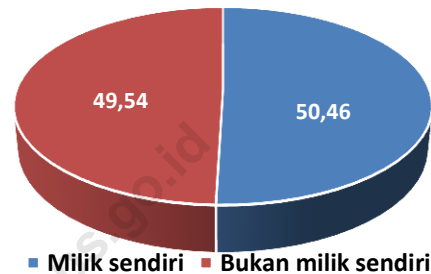
7.1. Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah dapat memberikan indikasi tentang tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu daerah. Apabila sebuah rumah tangga memiliki rumah sendiri maka tingkat kesejahteraannya lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri. Akibat tidak

memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal maka rumah tangga harus menyewa atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal.

Berdasarkan Grafik 7.1., terlihat bahwa pada tahun 2018 hanya setengah populasi penduduk Kota Banda Aceh bertempat tinggal di rumah yang mereka miliki sendiri (50,46 persen). Hampir setengah sisa populasi (49,54 persen) menempati rumah kontrak/sewa, milik orang tua/sanak saudara, rumah bebas sewa, rumah dinas, sewa dan lainnya.

Grafik 7.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

7.2 Penguasaan Teknologi Informasi

Di era informasi saat ini, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendorong pergerakan ekonomi. Potensi teknologi informasi dan komunikasi jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, keberadaan teknologi tersebut mampu berperan menciptakan lapangan pekerjaan, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Tabel 7.1.
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kota Banda Aceh, 2018

	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	91,55	84,17	67,38
Perempuan	88,45	79,86	62,38
Pendidikan Tertinggi			
SD ke bawah	71,08	49,48	35,46
SMP ke atas	97,08	94,16	75,89
Kota Banda Aceh	90,05	82,08	64,96

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Pada tahun 2018, sebanyak 82,08 persen rumah tangga di Kota Banda Aceh telah memiliki telepon seluler (HP) sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Keberadaan interaksi sosial antara masyarakat pun saat ini sudah dimeriahkan dengan keberadaan berbagai media sosial online seperti facebook, twitter, bbm, whatsapp, sehingga tak heran hampir dua pertiga (64,96 persen) rumah tangga di Kota Banda Aceh pun telah mengakses internet terutama dalam mengakses berbagai media sosial tersebut.

Selain penggunaan telepon seluler (HP), penggunaan komputer (PC/desktop, laptop/ notebook, tablet) pun sudah jamak pada rumah tangga di Kota Banda Aceh. Sebanyak 90,05 persen rumah tangga telah menggunakan baik telepon seluler maupun computer dalam aktivitas sehari-hari.

7.3 Sumber Penerangan

Rumah yang sehat selain berlantai, berdinding dan beratap yang kuat/kokoh harus juga cukup udara dan cahaya matahari agar sirkulasi udara di dalam rumah tersebut berjalan lancar. Pada siang hari, diharapkan cahaya matahari yang masuk ke rumah cukup untuk menerangi rumah tersebut dan pada malam hari sumber penerangan seperti lampu ataupun yang lainnya harus mampu menjangkau ke seluruh bagian rumah agar tercipta suasana yang memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

Pada saat ini, listrik PLN merupakan sumber penerangan utama di Kota Banda Aceh, dengan adanya listrik PLN masyarakat di daerah ini dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang ditimbulkannya seperti kemudahan untuk menggunakan alat-alat elektronik yang membutuhkan listrik sebagai sumber tenaganya. Pada tahun 2018, 100 persen rumah tangga di Kota Banda Aceh telah menggunakan listrik PLN.

7.4 Sumber Air Minum

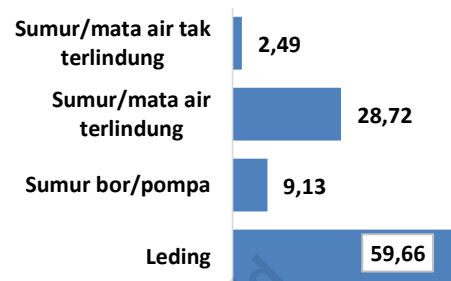
Kualitas air minum yang digunakan terkait kuat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu pada saat mencari tempat tinggal biasanya yang menjadi perhatian utama adalah sumber air. Kebersihan dan kesehatan air minum suatu rumah tangga berpengaruh langsung kepada anggota rumah tangga yang mengkonsumsi air tersebut karena air minum merupakan kebutuhan utama manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Air minum yang bersih dan sehat adalah air minum yang terbebas dari kuman-kuman penyebab timbulnya penyakit. Bila sumbernya tercemar oleh kotoran, maka dikhawatirkan air yang dihasilkannya pun akan tercemar pula.

Air leding dan air kemasan merupakan air yang kebersihan dan kesehatannya lebih terjamin. Berdasarkan Grafik 7.2., lebih dari setengah (59,66 persen) rumah tangga di Kota Banda Aceh menggunakan air leding sebagai sumber air untuk memasak, mandi, cuci, dan lainnya. Sedangkan lebih dari seperempat rumah tangga (28,72 persen) menggunakan sumur/ mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari tersebut. Sisanya menggunakan sumur bor/pompa dan sumur/mata air tak terlindung masing-masing 9,13 persen dan 2,49 persen.

7.5 Tempat Buang Air Besar

Fasilitas penunjang kesehatan suatu rumah selain air minum dan sumber penerangan, tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan merupakan unsur penting dalam mewujudkan kenyamanan dan kesehatan suatu rumah. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik karena kotoran tidak akan mencemari lingkungan di sekitarnya bila jaraknya dari sumber air memenuhi syarat juga. Namun tidak semua rumah mempunyai tempat buang air besar yang baik karena keterbatasan lahan maupun biaya. Oleh karena itu

Grafik 7.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Masak, Mandi, dan Cuci di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

masih banyak rumah tangga yang membuang kotorannya ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Keadaan ini tentunya perlu mendapat perhatian karena dapat mencemari lingkungan dengan bau dan pencemaran lain yang ditimbulkannya.

Grafik 7.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh, 2018

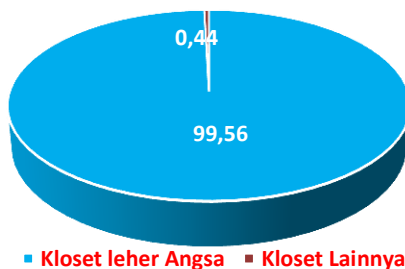


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Pada Grafik 7.3., terlihat bahwa fasilitas buang air besar yang digunakan oleh rumah tangga sebagian besar adalah milik sendiri, yaitu sebanyak 90,62 persen. Meski demikian masih ada 9,38 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama, MCK Umum atau tanpa fasilitas buang tempat buang air besar.

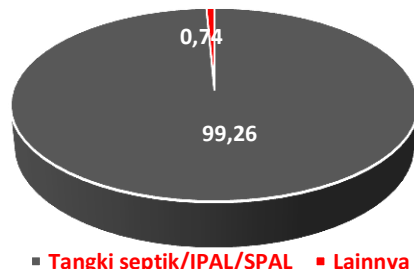
Sanitasi rumah tangga yang baik merupakan salah satu ciri rumah tangga yang sehat, tempat pembuangan akhir tinja yang baik merupakan gambaran sanitasi rumah tangga yang baik. Jenis kloset leher angsa merupakan jenis kloset terbaik ditinjau dari aspek kesehatan karena kloset jenis leher angsa mampu menahan bau yang dapat dikeluarkan oleh kotoran manusia.

Grafik 7.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Grafik 7.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Pada Tahun 2018, hampir seluruh rumah tangga di Banda Aceh (99,56 persen) telah menggunakan kloset jenis leher angsa dengan sebagian besar tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/IPAL/SPAL (99,26 persen).



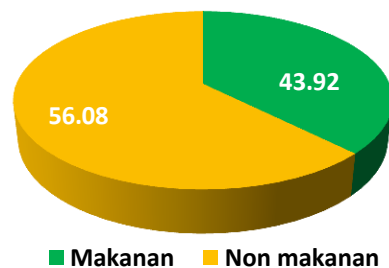
BAB VIII KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar, melebihi 50 persen dari total pengeluaran perkapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran perkapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran

Grafik 8.1.
Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita
Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan
di Kota Banda Aceh, 2018

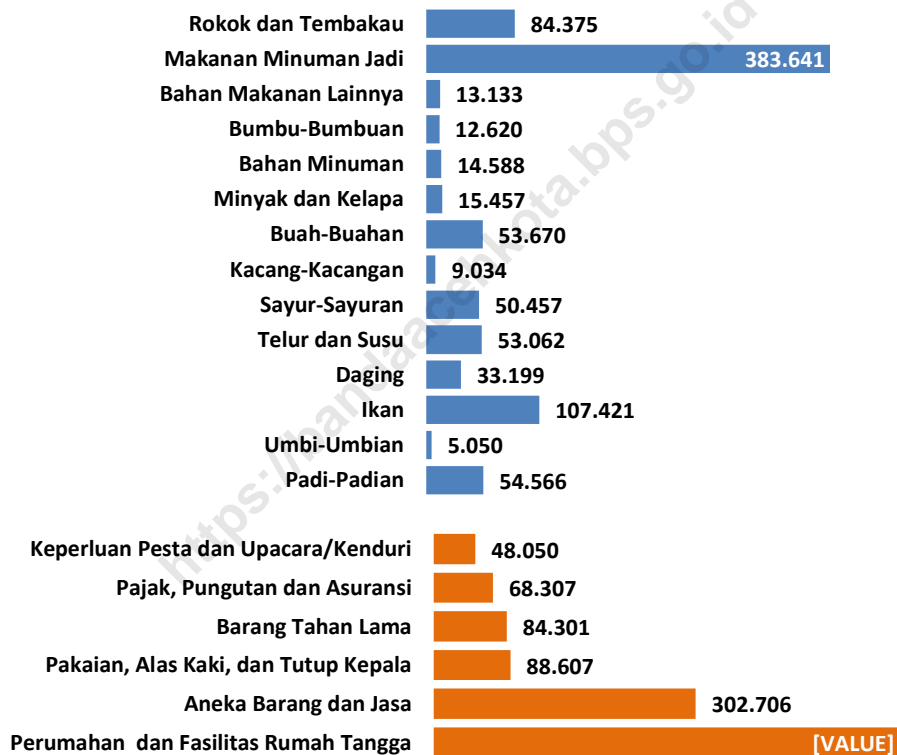


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan, dan lain-lain, adalah bagian terbesar dari pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2018, perbandingan komposisi pengeluaran makanan dan non makanan di Kota Banda Aceh sedikit berbeda dimana pengeluaran makanan sebesar 43,92 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 56,08 persen.

Grafik 8.2.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kota Banda Aceh (Rupiah), 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Pada tahun 2018, pengeluaran terbesar rumah tangga berada pada pos perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar Rp. 544.862,-. Pos pengeluaran terbesar berikutnya adalah konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 383.641,- serta pembelian aneka barang dan jasa sebesar Rp. 302.706,- (termasuk di dalamnya adalah pengeluaran bahan bakar dan transportasi). Ketiga pos pengeluaran tersebut merupakan 60,74 persen dari pengeluaran perkapita rumah tangga di Kota Banda Aceh di tahun 2018.



BAB IX KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, namun kehadiran kemiskinan juga ada di setiap wilayah.

Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota. Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari pandangan ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Dalam rangka mewujudkan salah satu komitmen MDG's (*Millenium Development Goals*) dan komitmen nasional untuk mengurangi kemiskinan, maka penanggulangan kemiskinan pun terus dilakukan. Penanggulangan kemiskinan harus diupayakan secara terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar bagi kehidupannya.

Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk efektivitas pencapaian program yang dijalankan.

9.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis Kemiskinan menurut BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan (BPS).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan sebesar Rp. 500.768,-. Selama kurun waktu empat tahun, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp

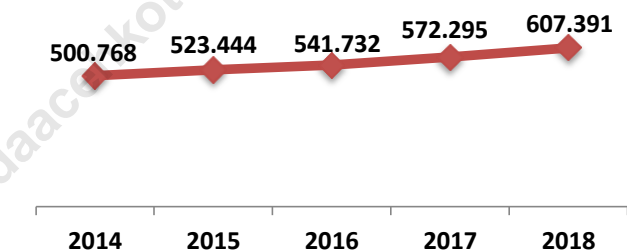
607.391,- pada tahun 2018. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan minimum per bulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup layak haruslah di atas 607.391 rupiah pada tahun 2018.

Meningkatnya garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Untuk memperoleh standar hidup yang layak maka daya beli masyarakat tidak boleh turun. Agar daya beli masyarakat tidak turun maka pendapatan harus naik sehingga garis kemiskinan juga naik.

9.2. Persentase Kemiskinan

Konsep kemiskinan menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

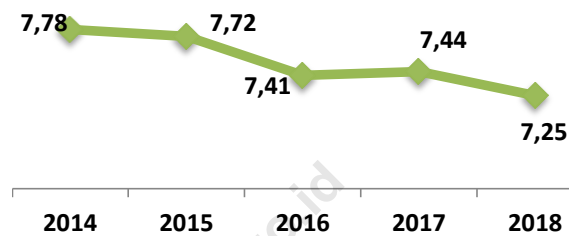
Grafik 9.1.
Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh
(Rupiah), 2014-2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2014-2018)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh sebesar 7,78 persen, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,25 persen.

Grafik 9.2.
Persentase Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh, 2014-2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2014-2018)



BAB X SOSIAL EKONOMI LAINNYA

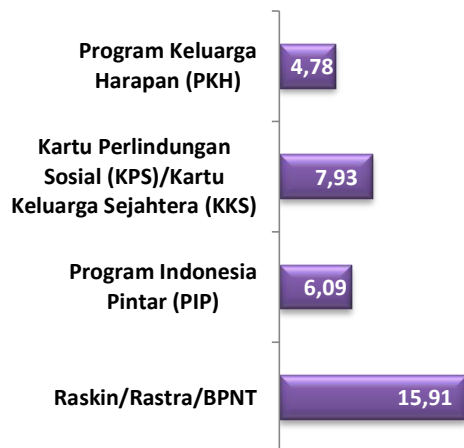
Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang dapat digambarkan berdasarkan hasil Susenas, selain berkaitan dengan keadaan kesehatan, pendidikan, perumahan, dapat pula dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan kesejahteraan seseorang, antara lain rumah tangga yang mendapat pelayanan kesehatan gratis, pemberian bantuan tunai pendidikan terkait Program KIP (Kartu Indonesia Pintar), bantuan non tunai KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) untuk keluarga kurang mampu dan bantuan kredit usaha.

Penerbitan kartu pelayanan kesehatan secara gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di bidang kesehatan.

Grafik 10.1. memperlihatkan bahwa 4,78 persen rumah tangga di Kota Banda Aceh merupakan rumah tangga sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Program perlindungan sosial ini memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan tujuan mengurangi beban rumah tangga tersebut dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan

7,93 persen rumah tangga menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dalam

Grafik 10.1.
Persentase Penduduk Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

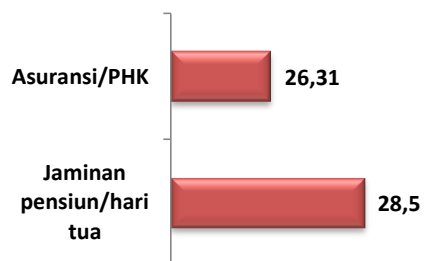
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak pada tahun 2013.

Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Menurut data Susenas 2018 di Banda Aceh penerima PIP sebesar 6,09 persen.

Sementara 15,91 persen rumah tangga di Banda Aceh di tahun 2018 merupakan penerima program bantuan non pangan tunai (BNPT) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberadaan Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Di tahun 2018, sebanyak 26,31 persen rumah tangga memiliki satu atau lebih jenis asuransi berupa asuransi kematian, jaminan kecelakaan kerja ataupun pesangon PHK. Sedangkan 28,50 persen rumah tangga memiliki jaminan pensiun ataupun jaminan hari tua.

Grafik 10.2.
Persentase Penduduk Menurut Jaminan Sosial Dimiliki di Kota Banda Aceh, 2018

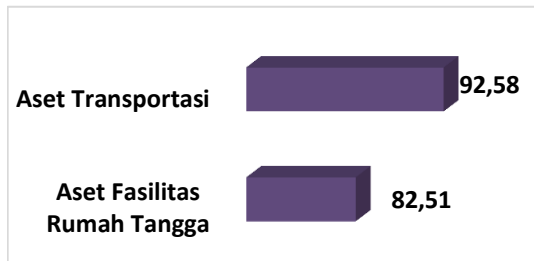


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Selain Perlindungan Sosial yang diberikan pemerintah dan jaminan sosial yang dimiliki, rumah tangga juga mempunyai aset sebagai sumber daya ekonomi. Pada tahun 2018, sebanyak 82,51 persen rumah tangga di Kota Banda Aceh memiliki setidaknya salah satu aset fasilitas rumah tangga seperti lemari es/kulkas,

AC/pendingin ruangan, pemanas air, televisi layar datar (minimal 30 inci), tabung gas, dan telepon rumah.

Grafik 10.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Aset Dimiliki
di Kota Banda Aceh, 2018



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2018)

Memenuhi karakteristik perkotaan yang *mobile*, sebanyak 92,58 persen rumah tangga memiliki salah satu aset transportasi seperti sepeda motor, perahu, perahu motor, ataupun mobil.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Jl. Laksamana Malahayati KM 6,5 Desa Baet, Kab. Aceh Besar
Telp/Fax: (0651) 8012501, Email: bps1171@bps.go.id
<http://bandaacehkota.bps.go.id>